

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan diawal tulisan ini, dapat dipetik simpulan penelitian yang sedang dilakukan ini, yaitu :

1. Dinamika pemahaman masyarakat terhadap rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu tampak tidak terlalu menonjol dan masyarakat wilayah Seberang Ulu sendiri lebih cenderung menyerahkan segala prosesnya kepada Tim P3KPU dan Pemerintah. Masyarakat siap menerima apapun hasilnya nanti walaupun dari berbagai opini mereka menginginkan untuk masuk ke wilayah Kota Palembang.
2. Rencana pemekaran wilayah Seberang Ulu dalam perspektif politik lokal terlihat dari keterlibatan Tim P3KPU, BAPPEDA Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat wilayah Seberang Ulu. Untuk mewujudkan rencana pemekaran tersebut dibutuhkan adanya kajian yang matang dan mendalam dalam sebuah rencana pemekaran. Upaya yang telah dilakukan oleh Tim P3KPU yaitu telah membentuk tim kajian akademik yang nantinya hasil dari naskah akademik itulah kemudian akan dijadikan bahan untuk dipresentasikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dikalangan kampus, di masyarakat luas dalam diskusi publik. Sedangkan upaya yang dilakukan DPRD, BAPPEDA, dan LSM Kota Palembang yaitu mereka mendukung

penuh jika rencana pemekaran ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi mereka tidak mendukung jika rencana ini hanya ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemekaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tidak serta merta membuat elite politik lokal berlomba-lomba memekarkan daerahnya tanpa tujuan dan arah yang jelas. Isu pemekaran dibaluti dengan aspirasi masyarakat yang kuat sehingga pemekaran menjadi harga mati untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah makna yang sangat “dangkal”. Pemerintah harusnya lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak melihat pemekaran sebagai jalan utama untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Pemerintah Pusat harus lebih mempertegas kebijakan pemekaran. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemekaran tersebut harus tegas menyatakan jika Daerah Otonomi Baru belum layak dimekarkan, sehingga dengan sikap tegas ini DOB yang memang belum layak tidak akan menjadi DOB baru, maka elite politik lokal tidak bisa berbuat banyak jika hasil pertimbangan memang benar.
3. Adanya penelitian tindakan lanjutan untuk menyempurnakan penelitian ini yaitu dengan mengadakan penelitian yang sama dengan menganalisa

permasalahan terkait dengan rencana pemekaran dalam perspektif politik lokal.